

POTENSI RISIKO HUKUM PERBANKAN BERBASIS *DIGITAL* DI INDONESIA

INTISARI

Oleh:

Handy Setyawan¹ dan Veri Antoni²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab potensi risiko hukum pada perbankan berbasis *digital* di Indonesia, serta peran Undang-undang dan/atau peraturan yang mendukung untuk mengimplementasikan aktivitas perbankan *digital*.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan pendekatan penelitian bersifat deskriptif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat, seperti dari undang-undang dan/atau peraturan, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal hukum, buku karya dosen maupun praktisi hukum yang terkait dengan perbankan, serta dari bahan hukum tersier dan internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penerapan operasionalisasi perbankan berbasis *digital* berpotensi terjadinya risiko hukum, serta undang-undang perbankan saat ini yang berlaku belum sepenuhnya dapat memitigasi/mengakomodasi risiko hukum sistem perbankan secara *digital*. Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa penerapan operasionalisasi perbankan berbasis *digital* di Indonesia saat ini memiliki potensi risiko hukum, jika tidak diimbangi dengan mitigasi yang cukup memadai bagi bank. Undang-undang perbankan dan/atau peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat untuk memitigasi risiko bank berbasis *digital* di Indonesia, mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berlaku belum dilakukan perubahan atau pengkinian dapat mempengaruhi potensi risiko hukum bagi perbankan yang beroperasi berbasis *digital*.

Kata kunci: Potensi Risiko Hukum, Bank Digital.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Pembimbing Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada

POTENTIAL LEGAL RISKS OF DIGITAL BASED BANKING IN INDONESIA

ABSTRACT

By:

Handy Setyawan³ and Veri Antoni⁴

This study aims to identify and analyze the causes of potential legal risks in digital-based banking in Indonesia and the role of laws and regulations that support the implementation of digital banking activities.

This research method uses normative legal research, while the research approach is descriptive. The research data sources used are secondary sources consisting of binding primary legal materials, such as laws and/or regulations. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from previous studies, legal journals, books by lecturers and legal practitioners related to banking, and tertiary legal materials and the internet. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of this study provide an illustration that the implementation of digital-based banking operations has the potential for legal risks, and the current banking laws that apply have not fully accommodated the legal risks of the digital banking system. The conclusion in this study is that the implementation of digital-based banking operations in Indonesia currently has potential legal risks, if it is not balanced with adequate mitigation for banks. The existing banking laws and/or regulations are not yet fully able to accommodate digital-based banks in Indonesia, considering that the applicable Law Number 10 of 1998 has not been amended or updated that could affect the potential legal risks for banks operating digitally based.

Keywords: Potential Legal Risk, Digital Bank.

³ Master of Law Student at Gadjah Mada University

⁴ Advisory Lecturer for Master's Thesis of Law, Gadjah Mada University